



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026



Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan Ambon



BerAKHLAK

panganbiru

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Triwulan I Tahun 2026 ini telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026 Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon. LKJ Triwulan I Tahun 2026 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi Stasiun PSDKP Ambon. Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Harapan kami, Laporan kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf UPT Stasiun PSDKP Ambon dan semua pihak yang terkait.

Ambon, 17 April 2026
Kepala Stasiun PSDKP Ambon



Johannis Johniforus Medea, S.St.Pi
NIP. 198507012009011002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Ambon Triwulan I Tahun 2026 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2026 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Ambon telah menyusun perjanjian kinerja Triwulan I Tahun 2026 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Dalam perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Ambon terdiri dari Sasaran Kegiatan UPT Stasiun PSDKP Ambon yang bermuara pada 9 Sasaran Kegiatan yaitu: ⁽¹⁾ Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif; ⁽²⁾ Terselenggaranya Intelejen Kelautan dan Perikanan secara Efektif; ⁽³⁾ Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan; ⁽⁸⁾ Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan sesuai ketentuan; ⁽⁹⁾ Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Kegiatan, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK). Pada Tahun 2026 terdapat 21 Indikator Kinerja pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja Stasiun PSDKP Ambon namun yang telah terealisasi di Triwulan I Tahun 2026 adalah 9 Indikator Kinerja. Total Nilai Kinerja Organisasi Stasiun PSDKP Ambon Triwulan I Tahun 2026 adalah 114.46 % (kategori baik).

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Triwulan I Tahun 2026

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%
		2026	MARET	MARET	
SK.01	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif				
	IK.01	Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS	83	0	
SK.02	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif				
	IK.02	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100	0	
	IK.03	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100	0	
SK.03	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan			120	
	IK.04	Nilai kualitas pengawasan sumber daya Kelautan	83	50	75,52
SK.04	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan			120	
	IK.05	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	83	60	98,5
SK.05	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif			110	
	IK.06	Indeks Operasi Kapal Pengawas	92,25	89	97,9
	IK.07	Indeks Operasi Speedboat Pengawas	92,25	0	
	IK.08	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan perawatan Sarana / Armada pengawasan SDKP	100	0	
SK.06	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan			120	
	IK.09	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	82	65	100
	IK.10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	82	65	100
SK.07	Terselenggaranya Penindakan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				
	IK.11	Indeks Penyelesaian Penindakan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	82	0	
SK.08	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			102,32	
	IK.12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Stasiun PSDKP Ambon	81,75	0	
	IK.13	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Ambon	81,5	0	
	IK.14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Ambon	92,1	0	
	IK.15	Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Ambon	88,2	0	
	IK.16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100
	IK.17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	86	86	86
	IK.18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Stasiun PSDKP Ambon	88,8	88,8	94,29
	IK.19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Ambon	75	0	
	IK.20	Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Ambon	78	0	
	IK.21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	71	0	

Tercapainya Indeks Kinerja Stasiun PSDKP Ambon tidak terlepas dari peran serta seluruh pegawai lingkup Stasiun PSDKP Ambon, baik itu pada Stasiun, Satuan Pengawasan, maupun juga Wilayah Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon, serta Awak Kapal Pengawas yang saling mendukung dalam tercapainya target kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026. Melalui Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan pada Triwulan berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Ambon.....	2
1.4. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	4
1.5. Struktur Organisasi.....	4
1.6. Sistematika Penyajian Laporan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	
3.1. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon.....	10
3.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon	
1. IKU 04. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan.....	12
2. IKU 05. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan.....	19
3. IKU 06. Indeks Operasi Kapal Pengawas.....	24
4. IKU 09. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang KP.....	29
5. IKU 10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan SDKP.....	31
6. IKU 16. Presentase pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko.....	33
7. IKU 17. Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang dokumen Tindak Lanjutnya dilengkapi dan disampaikan.....	34
8. IKU 18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Stasiun PSDKP Ambon.....	36
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	37
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran.....	38
C. Rekomendasi.....	38
LAMPIRAN.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Triwulan I Tahun 2026.....	iii
Tabel 2.1 Pernjanjian Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2026.....	8
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) + Indikator Kinerja (IK) TriwulanI Tahun 2026 Stasiun PSDKP Ambon.....	10
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan 3 “Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan.....	12
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan.....	12
Tabel 3.4 Hasil Pengawasan Ruang Laut.....	16
Tabel 3.5 Hasil Pengawasan Unit Usaha yang melakukan Pemanfaatan ALSE	18
Tabel 3.6 Capaian Sasaran Kegiatan 4 “Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan.....	18
Tabel 3.7 Capaian kinerja IKU 05“Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan.....	19
Tabel 3.8 “Hasil Pengawasan Budidaya.....	22
Tabel 3.9 “Hasil Pengawasan Unit Pengolahan Ikan.....	22
Tabel 3.10 “Hasil Pengawasan Distribusi.....	22
Tabel 3.11 “Hasil Pengawasan jenis Ikan Dilindungi.....	23
Tabel 3.12 “Capaian Sasaran Kegiatan 5 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Yang efektif.....	24
Tabel 3.13 Perhitungan Indeks Operasi Kapal Pengawas.....	25
Tabel 3.14 Capaian kinerja IKU 06 “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”	26
Tabel 3.15 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6	29
Tabel 3.16 Capaian Kinerja IKU 09 “Presentasi Pengenaan Sanksi Administratif”	29
Tabel 3.17 Perhitungan Indeks Kinerja Pengenaan Sanksi Administratif.....	30
Tabel 3.18 Capaian IK 10 “Presentase pemeriksaan hasil analisis pemantauan SDKP.....	31
Tabel 3.19 Perhitungan Indeks Kinerja hasil analisis pemantauan SDKP.....	31
Tabel 3.20 Capaian Sasaran Kegiata 8.....	32
Tabel 3.21 Capaian IK 16 “Presentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis MR”	33
Tabel 3.22 Capaian IK 17 “Presentase Jumlah Rekomendasi yang telah dilengkapi dan disampaikan” ...	35
Tabel 3.23 Capaian IK 18 “Indeks Kepuasan Masyarakat”.....	36
Tabel 3.24.Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon Pada Triwulan III Triwulan I Tahun 2026.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Ambon.....	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Ambon.....	6
Gambar 3. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Ambon Triwulan I Tahun 2026.....	10
Gambar 4. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Triwulan I Tahun 2026.....	14
Gambar 5. Capaian kinerja “Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan “lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP.....	15
Gambar 6. Capaian kinerja Indeks pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha Perikanan lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP	20
Gambar 7. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Triwulan I Tahun 2026.....	21
Gambar 8. Kegiatan Gelar Operasi kapal Pengawas HIU 13 Triwulan I Tahun 2026.....	21
Gambar 9. Capaian Kinerja “ Indeks Operasi Kapal Pengawas”	28
Gambar 10. Capaian Kinerja “Indeks penebaran sanksi administratif bidang kelautan dan Perikanan” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP.....	30
Gambar 11. Capaian Kinerja “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan SDKP.....	32
Gambar 12. Capaian Kinerja “Presentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis MR.....	34
Gambar 13. Capaian Kinerja “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan “lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP.....	35
Gambar 12. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT PSDKP merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. UPT PSDKP Ambon merupakan UPT yang ditetapkan berdasarkan KEPMEN Nomor 33/PERMEN-KP/2016 pada tanggal 28 September 2016. Stasiun PSDKP Ambon membawahi 4 (Empat) Satuan Pengawas (Satwas), yaitu: Seram Bagian Timur, Halmahera Selatan, Ternate, dan Morotai.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Stasiun PSDKP Ambon sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapainya. Pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel/efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Stasiun PSDKP Ambon adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran, kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2) Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja Triwulan I Tahun 2026 adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun PSDKP Ambon serta memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik di masa yang akan datang, dimulai dari proses perencanaan yang benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap triwulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik lagi.

1.3 Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Ambon

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, UPT Stasiun PSDKP Ambon melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun PSDKP Ambon menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan; Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Stasiun PSDKP Ambon memiliki wilayah kerja yang terbagi atas 4 wilayah yaitu :

1. Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Morotai ;
2. Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ternate : Wilayah Kerja Tobelo;
3. Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Halmahera Selatan
4. Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Seram Bagian Timur : Wilayah Kerja Banda dan Wilayah Kerja Masohi.



Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Ambon

Stasiun PSDKP Ambon juga memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten pada bidangnya, dengan total pegawai 97 Orang Pegawai (69 orang Pria dan 32 wanita) yang terdiri dari 53 orang PNS, 37 orang PPPK, 7 orang PJLP. Pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari 23 orang, jabatan PNS Pelaksana terdiri dari 30 orang, Jabatan PPPK fungsional tertentu sebanyak 19 orang, Jabatan PPPK Pelaksana sebanyak 9 orang, Jabatan PPPK Paruh Waktu sebanyak 9 orang dan Jabatan PJLP sebanyak 7 orang.

Adapun Sarana dan Prasarana yang terdapat pada Stasiun PSDKP Ambon adalah sebagai berikut :

- Daftar BMN yang dimiliki Stasiun PSDKP Ambon :
- Operasional Kapal Pengawas : Kapal Pengawas HIU 13
- Operasional Speedboat 8 M : Speedboat Tenggiri (Stasiun PSDKP Ambon)
- Operasional Speedboat 12 M :
 1. Napoleon 040 (Satwas Halmahera Selatan)
 2. Napoleon 051(Satwas SBT)
 3. Napoleon 055 (Satwas Ternate)

1.4 Permasalahan Utama (*Strategic Issued* Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain :

1. Bidang Perikanan Tangkap

Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI 714, 715 dan 716) baik yang dilakukan oleh kapal ikan indonesia (KII) maupun kapal ikan asing (KIA).

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut
- b. Penggunaan Obat dan Pakan Ikan yang membahayakan lingkungan perairan.
- c. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.
- d. Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

Limbah yang dihasilkan dalam pengolahan ikan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan.

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

Ikan berformalin masih ditemui di pasar-pasar tradisional.

5. Bidang Pengawasan Ruang Laut dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- b. Banyaknya kegiatan pemanfaatan ruang laut dan WP3K maupun reklamasi wilayah pesisir yang tidak mempunyai izin dasar (PKKPRL);
- c. Kerusakan terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti bom dan racun;
- d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

● Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala

Stasiun membawahi ketua tim kerja dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

1. Kepala Stasiun :

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Kepala Urusan Umum:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

3. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran:

Melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

4. Ketua Tim Kerja Prasarana dan Operasi Kapal Pengawas:

Melakukan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

5. Ketua Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan SDK

Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring operasional kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

6. Ketua Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan SDP

Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring operasional kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.



Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2025

2 Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Triwulan I Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2026.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan keuangan Stasiun PSDKP Ambon Triwulan I Tahun 2026.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari : 1) Rencana strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2025-2029; dan 2) Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2026.

A. Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Ambon memiliki Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya.

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id dan merupakan aplikasi berbasis informasi teknologi.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2026

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	83
2.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan (Nilai)	100

		3. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan (Nilai)	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan (Nilai)	83
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5. Nilai Kualitas Pengawasan sumber daya perikanan (Nilai)	83
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6. Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)	92,25
		7. Indeks operasi speedboat pengawas (Indeks)	92,25
		8. Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP (Indeks)	100
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	82
		10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	82
7.	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	82
8.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	81,75
		13. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	81,5
		14. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	92,1

BAB AKUNTABILITAS KINERJA

III

3.1 Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon

Berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon meliputi 5 Sasaran Kegiatan dengan 8 Indikator Kinerja. Nilai Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Sebesar 114,46 % dengan kategori biru (istimewa) pada Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2026 (Gambar 3).



Sumber : <https://kinerjaku.kkp.go.id>

Gambar 3. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Ambon Triwulan I Tahun 2026

Capaian Kinerja diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kerja antara Kepala Stasiun PSDKP Ambon dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap Sasaran Kegiatan merupakan hasil perhitungan IKU dan IKM yang menjadi parameter tercapainya Sasaran Kegiatan. Capaian masing-masing Sasaran kegiatan serta IKU dan IKM dapat dilihat pada Table berikut :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) + Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Stasiun PSDKP Ambon Triwulan I Tahun 2026

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
		2026	MARET	MARET		s/d MARET	s/d MARET	
SK.01	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif							
IK.01	Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS	83	0			0	0	
SK.02	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif							
IK.02	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100	0			0	0	
IK.03	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100	0			0	0	

SK.03	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan			120			120	
IK.04	Nilai kualitas pengawasan sumber daya Kelautan	83	50	75,52	120	50	75,52	120
SK.04	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan			120			120	
IK.05	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	83	60	98,5	120	60	98,5	120
SK.05	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif			110			110	
IK.06	Indeks Operasi Kapal Pengawas	92,25	89	97,9	110	89	97,9	110
IK.07	Indeks Operasi Speedboat Pengawas	92,25	0			0	0	
IK.08	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan perawatan Sarana / Armada pengawasan SDKP	100	0			0	0	
SK.06	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan			120			120	
IK.09	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	82	65	100	120	65	100	120
IK.10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	82	65	100	120	65	100	120
SK.07	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan							
IK.11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	82	0			0	0	
SK.08	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			102,32			102,32	
IK.12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Stasiun PSDKP Ambon	81,75	0			0	0	
IK.13	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Ambon	81,5	0			0	0	
IK.14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Ambon	92,1	0			0	0	
IK.15	Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Ambon	88,2	0			0	0	
IK.16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100	100	100	100	100
IK.17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	86	86	86	100	86	86	100
IK.18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Stasiun PSDKP Ambon	88,8	88,8	94,29	106	88,8	94,29	106
IK.19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Ambon	75	0			0	0	
IK.20	Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Ambon	78	0			0	0	
IK.21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	71	0			0	0	

Sumber : <https://kinerjaku.kkp.go.id>

3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon

Pada Triwulan I Tahun 2026, Stasiun PSDKP Ambon telah melakukan tugas dan fungsinya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Analisis pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Ambon pada Triwulan I Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

- **Sasaran Kegiatan 3. “Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 yaitu *“Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan”* diuraikan dalam 1 IKU yaitu (1) *“Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan”* adapun capaian Indikator Kinerja pada Sasaran kegiatan 3 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan 3 “ Terselenggaranya pengawasan daya kelautan”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
		2026	MARET	MARET		s/d MARET	s/d MARET	
SK.03	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan			120			120	
IK.04	Nilai kualitas pengawasan sumber daya Kelautan	83	50	75,52	120	50	75,52	120

1. IKU 04 “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan”

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Pengawas Perikanan dan/atau Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPR), pelaku usaha jasa kelautan, pelaku usaha yang tidak menimbulkan pencemaran, pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi, pelaku usaha pemanfaatan pesisir (reklamasi) dan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil. Pada Triwulan Triwulan I Tahun 2026 capaian IKU 0.4 *“Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan”* adalah 75,52 dari yang ditargetkan 50 atau 120% (Tabel.3.2) .

Tabel 3.3 Capaian kinerja IKU 3.1 “Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		Triwulan I Tahun 2026	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.04	Nilai kualitas pengawasan sumber daya Kelautan (Nilai)	100	100	95	100	100	100	100	100	50	75,52

IKU ini berbeda perhitungannya dan pencapaiannya dengan Tahun 2022,2023,2024 dan 2025. Pada Triwulan I Tahun 2026 IKU ini berubah nomenklaturnya menjadi Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya kelautan dan mampu mencapai nilai capaian kinerja sebesar 75,52 (Tabel 3.2). Indeks Kinerja ini memiliki alokasi anggaran efisiensi sebesar Rp.383.600.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Hingga akhir Triwulan I Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp 127.891.192 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang setara dengan 33,34% dari total alokasi anggaran setelah efisiensi. Berdasarkan hasil capaian yang diperoleh dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dapat mendukung kegiatan secara efisien yang didukung oleh SDM yang mumpuni meskipun di tengah adanya efisiensi anggaran.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercapai melalui pemanfaatan informasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan patroli laut. Informasi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan meliputi: ⁽¹⁾ Perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); dan ⁽²⁾ Isu-isu yang beredar di masyarakat terkait daerah rawan pelanggaran tindak pidana kelautan, jenis pelanggaran yang sering terjadi, serta kemungkinan waktu terjadinya pelanggaran.

Seluruh pencapaian IKU ini tak terlepas dari Pengawas Kelautan, dan Polsus WP3K Stasiun PSDKP Ambon yang bersinergi bersama instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Loka PSPL Sorong Satker Ternate dan Ambon, Polair, TNI AL, dan Dinas Perikanan Kota Ambon yang turut andil bersama-sama menertibkan peraturan perundang-undangan bagi para pelaku usaha yang bergerak dibidang kelautan dalam hal ini memberikan dampak langsung terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaan kegiatan IKU ini juga tidak dipungkiri mendapatkan banyak tantangan dilapangan yakni jarak tempuh ke lokasi yang sebagian besar merupakan daerah kepulauan. Untuk meningkatkan keterampilan SDM dalam menunjang kegiatan pengawasan kelautan, 4 orang ASN telah mengikuti Sosialisasi Pengawasan Konservasi Laut selama 3 JP yang diselenggarakan oleh BDA Sukamandi pada tanggal 5 Maret 2026, 1 orang ASN telah mengikuti Microlearning Pengantar Soft Coral, Anemone, dan Artificial Liverock selama 3 JP yang diselenggarakan oleh BDA Sukamandi pada

tanggal 27 Februari 2026, 2 orang ASN telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengawasan Pemanfaatan Wisata Bahari yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan selama 3 JP pada tanggal 5 Februari 2026.

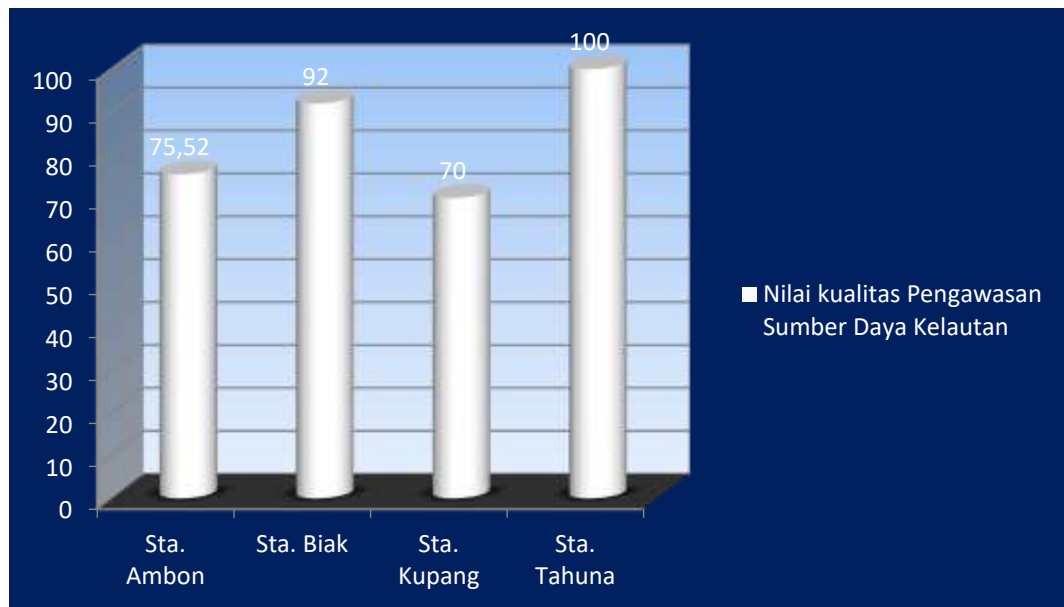
Ukuran keberhasilan IKU "*Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan*" diperoleh dari 6 komponen kegiatan pengawasan sumber daya kelautan yakni :

- a) Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
- b) Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya;
- c) Unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya;
- d) Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya; dan
- e) Unit usaha pemanfaatan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya;



Gambar 4. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Triwulan I Tahun 2026

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa Nilai Kualitas pengawasan sumber daya kelautan semua UPT PSDKP telah tercapai melebihi target yang ditetapkan (Gambar 11).



Gambar 5. Capaian kinerja “Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP Triwulan I tahun 2026

❖ 3 Kegiatan pembentuk IKU Pengawasan Sumber Daya Kelautan pada Triwulan I Tahun 2026

1. Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya

Pengawasan kawasan konservasi yang dilakukan oleh Pengawas Kelautan dan Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon ditargetkan pada Kawasan Konservasi Nasional TWP Laut Banda. Dalam melakukan kegiatan pengawasan kawasan konservasi perairan target pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan kelautan dan perikanan di kawasan konservasi nasional TWP Laut banda. Adapaun kegiatan tersebut terdiri dari :

- penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi
- pembudidayaan ikan
- penelitian, dan pendidikan
- kegiatan pariwisata alam perairan

- pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar dan penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan
- pendirian dan/atau penempatan bangunan laut
- penempatan instalasi di laut
- pemanfaatan air laut selain energi
- pembuatan foto, film dan video komersial
- landing, take off, dan taxiing seaplane

Parameter verifikasi pelaku usaha pada kawasan konservasi yakni:

- Memiliki dokumen perizinan (TDUP/TDKP/ NIB/Surat izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi untuk pengusahaan pariwisata alam perairan/Surat izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap /SIUP/dokumen lainnya).
- Kesesuaian zonasi kegiatan pelaku usaha di dalam kawasan konservasi perairan. Pada Triwulan I Tahun 2026 belum dilakukan pengawasan kawasan konservasi perairan dalam hal ini terhadap Nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan pada zona pemanfaatan di wilayah Kawasan Konservasi Nasional TWP Laut Banda dan ditargetkan pengawasannya pada Triwulan II.

2. Unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya

Pada Triwulan I Tahun 2026 target pengawasan unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya oleh Pengawas Kelautan dan Polsus PWP3K Stasiun PSDKP Ambon dengan Parameter pemeriksaan yakni :

- Memiliki dokumen KKPRL
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan

Pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 23 Kegiatan usaha. Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tabel 3.5. Hasil Pengawasan Ruang Laut

No	Tanggal Pelaksanaan	Pelaku Usaha	Izin KKPRL	NIB	Titik Koordinat	Luas
RUTIN						
1	21 - 28 Januari 2026	PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park	160123105182000002	8120315042745	0° 28' 36,181" LU - 127° 58' 37,237" BT	672.71 Ha
2	21 - 28 Januari 2026	PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park	221124105182000004	8120315042745	0°24'20.01"S - 127°43'22.64"E	98.56 Ha

3	21 - 28 Januari 2026	PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park	B.1299/MEN-KP/VII/2024	8120315042745	0° 27' 59,682" LU - 127° 56' 12,999" BT	160.25 Ha
4	18 Februari 2026	PT. Natural Indococonut Organik	13122410518200010	9120102681301	01°37'25,825" LU; 127°59'21.181" BT	7 Ha
5	4 - 7 Maret 2026	PT. Gunung Makmur Indah	23052510518100016	9120102681301	2°50'1,69285"S – 128°30'48,37198" E	1.5 Ha
6	9 - 11 Maret 2026	PT. Morotai Marine Culture	10022310518200001	8120104922208	2° 12' 5,918" LU; 128° 12' 46,892" BT	11.65 Ha
7	31 Maret 2026	PT. Multi mina Persada	28022510518100012	8120105870213	3°35'16.936" LS - 128°19'50.071"BT 3°35'15.700" LS - 128°19'50.584"BT3°35'15.859" LS - 128°19'50.985"BT3°35'17.109" LS - 128°19'50.490"BT	0,06 Ha
8	31 Maret 2026	PT. Rajawali Laut Timur	02082210518100004	9120200161673	3°38'14,561"LS 128°12'50,999"BT3°38'14,115"LS 8128°12'51,464"BT3°38'13,011"LS 128°12'50,482"BT3°38'13,405"LS 128°12'49,992"BT	0,09 Ha
9	31 Maret 2026	PT. Rajawali Laut Timur	01042410518100003	9120200161673	3°38'13,011"LS 128°12'50,482"BT3°38'12,045"LS 128°12'51,481"BT3°38'13,602"LS 128°12'52,977"BT3°38'15,043"LS 128°12'51,441"BT3°38'14,561"LS 128°12'50,999"BT3°38'14,115"LS 128°12'51,464"BT	0,33 Ha
INSIDENTAL						
10	14 Januari 2026	CV. Sari Gurih Beach	-	9120009153806	3°64'71.4"S – 128 ° 23'30.4"E	
11	14 Januari 2026	RM. Lateri Beach	-	220205862173	3°63"S - 128°22"E	0.066 Ha.
12	14 Januari 2026	Resto Dua Ikan	-	2106230019405	3.644131° S - 128.234257° E	
13	15 Januari 2026	Prana Cafe Amahusu	-	607250059242	3°43'54"S - 128°08'19"E	0.084 Ha.
14	15 Januari 2026	RM. Apung Emas Biru	-	-	3°42'13"S - 128°09'59"E	0.078 Ha
15	21 - 28 Januari 2026	PT. Pelabuhan Samudera Nusantara	-	311220088779	00° 27' 24" LS - 128° 10' 01" BT	0,922 Ha
16	21 - 28 Januari 2026	PT. Harum Sukses Mining	-	1247001490672	0.455707 S - 128.164493 E	0,532 Ha
17	21 - 28 Januari 2026	PT. Zhong Hai Rare Metal Mining Indonesia	-	8120313031899	0°28'37.37"N - 128° 4'32.57"E	0,532 Ha
18	21 - 28 Januari 2026	PT. Tekindo Energi	-	9120102410513	0.456543 S - 127.923892 E	0,848 Ha
19	27 - 29 Januari 2026	PT. Arumba Jaya Perkasa	-	0212210046858	00°58'12.3" LU - 127°55'23.1" BT	0,266 Ha
20	10 Februari 2026	Suwitno Adjam	-	1112230008406	1. 0°37'51.39"S - 127°36'40.48"E2. 0°37'51.06"S - 127°36'41.04"E3. 0°37'51.60"S - 127°36'42.30"E	0,082 Ha
21	10 Februari 2026	Renny Theis	-	2103220031053	0°37'48.73"S - 127°36'59.30"E	0,039 Ha
22	26 - 27 Februari 2026	PT. PLN (Persero) - Unit PLTU Tidore	-	8120003820135	0°44'24.26" LU - 127°23'08.25" BT 0°44'19.11" LU - 127°23'08.87" BT	
23	4 - 7 Maret 2026	PT. Globalindo Mutiara	-	9120402282266	3°19'8,36036"S – 128°19'54.95187" E	127,110 Ha

3. Pengawasan Jasa Kelautan (Air Laut Selain Energi)

Pada Triwulan I Tahun 2025 pengawasan unit usaha jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya oleh Pengawas Kelautan Stasiun PSDKP Ambon. Pengawasan jasa kelautan fokus pada kegiatan Air Laut Selain Energi dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pemanfaatan oleh PMA dan/atau PMDN meliputi kegiatan sebagai berikut:

Parameter verifikasi pelaku usaha:

- Memiliki dokumen izin pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan
- Kesesuaian luasan dan titik koordinat dengan dokumen perizinan

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan pemeriksaan terhadap unit usaha pemanfaatan ALSE yang diperiksa kepatuhannya sebanyak 1 Pelaku Usaha.

Tabel 3.8 Hasil Pengawasan Unit Usaha yang melakukan Pemanfaatan ALSE

No	Tanggal Pelaksanaan	Pelaku Usaha	Izin KKPRL & Izin ALSE	NO. KB LI	Titik Koordinat	Jumlah Pompa Air Laut
1	26 - 27 Februari 2026	PT. PLN (Persero) - Unit PLTU Tidore	'15022310518200 006	-	0°44'23.47" LU - 127°23'11.59" BT.	7 Unit

• Sasaran Kegiatan 4 “Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan”

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 yaitu “Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan” diuraikan dalam 1 IKU yaitu (1) “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan”.

Tabel 3.6 Capaian Sasaran Kegiatan 4 “Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
		2026	MARET	MARET		s/d MARET	s/d MARET	
SK.04	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan			120			120	
IK.05	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	83	60	98,5	120	60	98,5	120

2. IKU 4.1 “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan”

Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan adalah nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha dengan jumlah pelaku usaha perikanan yang diriksa. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan adalah upaya untuk memastikan tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan melalui tahapan pemeriksaan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Pelaku usaha perikanan adalah unit/proyek usaha orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang perikanan mencakup subsektor penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pembudidayaan lobster, kepiting dan rajungan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terdiri atas pengawasan rutin berbasis OSS dan pengawasan lainnya (pengawasan penangkapan ikan terukur, importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya ikan dan/atau tindak lanjut aduan masyarakat) yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental.

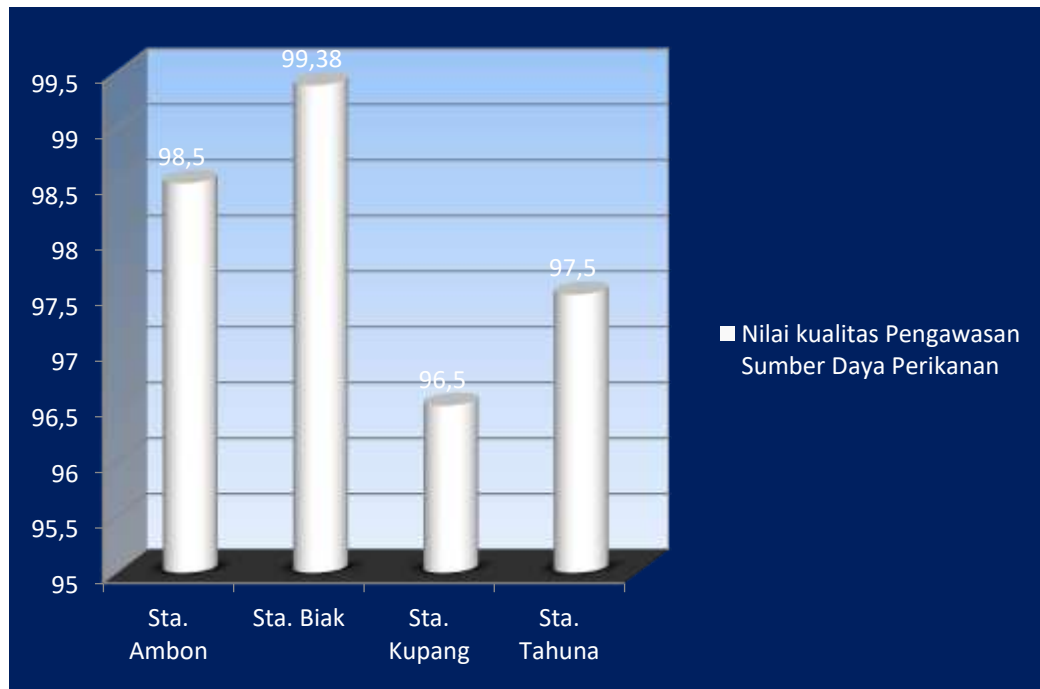
Tabel 3.7 Capaian kinerja IKU 05 “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TRIWULAN I TAHUN 2026	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.05	Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan	100	100	100	100	100	100	100	100	60	98,5

Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian kinerja IKU “Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan” yakni 98,5 dari yang ditargetkan 60 atau sebesar 120%. IKU ini berbeda perhitungannya dengan Tahun 2022 , 2023, 2024 dan 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan kinerja Tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, Stasiun PSDKP Ambon mampu melaksanakan capaian lebih dari target yang ditetapkan.

Indeks Kinerja ini memiliki alokasi anggaran setelah efisiensi sebesar Rp.266.168.000 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah). Hingga akhir Triwulan I Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp. 21.074.500 (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) yang setara dengan 7,92 % dari total alokasi anggaran. Berdasarkan hasil capaian yang diperoleh dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dapat mendukung kegiatan secara

efisien yang didukung oleh SDM yang mumpuni meskipun di tengah adanya efisiensi anggaran. IKU ini juga merupakan salah satu IKU yang diterapkan pada seluruh UPT lingkup Ditjen PSDKP. Adapun nilai capaian UPT lainnya (Tahuna, Kupang dan Biak) dapat tercapai sesuai melebihi target yang ditetapkan hal ini dapat dilihat pada (Gambar 6).



Gambar 6. Capaian kinerja indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP Triwulan I tahun 2026

Seluruh pencapaian kegiatan yang dilakukan terhadap IKU ini tidak terlepas dari peran serta Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon dalam melakukan kegiatan pengawasan dengan tujuan menertibkan peraturan perundang-undangan bagi para pelaku usaha yang bergerak dibidang perikanan dalam hal ini memberikan dampak langsung terhadap sumber daya perikanan.

Keberhasilan IKU ini diperoleh dari pencapaian beberapa kegiatan pengawasan yakni :

1. Pengawasan rutin berbasis OSS;
2. Pengawasan penangkapan ikan terukur;
3. Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional;
4. Pengawasan insidental



Gambar 7. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan kegiatan pengawasan berbasis resiko berdasarkan PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan. Adapun uraian hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan Stasiun PSDKP Ambon sebagai berikut :

❖ **Pengawasan Budidaya**

Pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan pengawasan budidaya ikan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan terhadap 2 pelaku usaha KBLI bidang Budidaya lobster, kepiting dan rajungan.

Tabel 3.8 Hasil Pengawasan Budidaya

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Perusahaan/Pelaku Usaha	Nama kelompok Nelayan	NIB	Titik Koordinat Lokasi Usaha	Nomor Kode Proyek	KBLI	Skala Usaha
1	20 Januari 2026	Bill Jazzy Wattimury	Pokdakan Usaha Bersama	1307230129672	0.69955, 127.45675	202506-1605-4716-1032-834	Pembesaran Crustacea Laut	Mikro
2	20 Januari 2026	Redha Astrian	Redha Astrian	0612230001978	0.68177, 127.45386	202312-0602-4151-0295-557	Pembesaran Crustacea Air Payau	Mikro

❖ Pengawasan Unit Pengolahan Ikan

Pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko pada subsektor pengolahan dan pemasaran ikan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan pada 2 pelaku usaha perikanan dengan KBLI Industri Pembekuan Ikan yang berlokasi di Ternate, Maluku Utara.

Tabel 3.9 Hasil Pengawasan Unit Pengolahan Ikan

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Perusahaan	NIB	Nomor Kode Proyek	Titik Koordinat Lokasi Usaha	Status Penanaman Modal	Kode KBLI	Skala Usaha
1	25 Februari 2026	PT. Irama Prima Sejahtera	1802250028073	202502-1810-0133-9007-220	0°20'07.52"N - 127°52'53.81"E	PMDN	KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan	Usaha Kecil
2	25 Februari 2026	PT. Irama Prima Sejahtera	1802250028073	202502-1810-0133-9007-220	0°20'07.52"N - 127°52'53.81"E	PMDN	KBLI 10217 - Industri Pendinginan/Pengemasan Ikan	Usaha Kecil

❖ Pengawasan Distribusi

Pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan terhadap 1 pelaku usaha. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Hasil Pengawasan Distribusi

NO	Tanggal Pemeriksaan	Nama Pelaku Usaha	Komoditas	Lokasi	Pemenuhan Perizinan Berusaha	Kesesuaian SKA	Kepatuhan
1	19 Februari 2026	9120200161673 PT. Rajawali Laut Timur	Lobster	Kota Ambon	Sesuai	Sesuai	Patuh

❖ Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi

Pada Triwulan I Tahun 2026 target pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya yakni sebanyak 4 pelaku usaha. Parameter verifikasi pelaku usaha terdiri dari :

- Memiliki dokumen perizinan (SIPJI/ SAJI)
- Memiliki kuota penangkapan dan ekspor untuk kegiatan penangkapan/ pengambilan dan perdagangan luar negeri
- Kesesuaian pelaksanaan usaha dengan izin yang dimiliki
- Kesesuaian jenis ikan

Pada triwulan I tahun 2026 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 pelaku usaha yaitu UD Raffa Seafood, CV. Utama Laut Mandiri , La Jaohati, dan Arahman Amir yang dilaksanakan oleh Pengawasan Perikanan Stasiun PSDKP Ambon. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	PELAKU USAHA	SIPJI	SAJI	KBLI	ALAMAT LOKASI	JENIS IKAN
1	28 Februari 2026	UD. Raffa Seafood	14/I/KKP/2020	00187/SAJI-DN/UPTD/JP3/II/2026	KBLI 03151 - Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Apendiks CITES	Jln. Pelabuhan Kupal Desa Kupal Kec. Bacan Selatan, Kab. Halamahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	Sphyrna lewini (Hiu Kepala Martil Bergerigi), Carcharhinus limbatus (Hiu Kejen, Lanjaman, Merak Bulu), Prionace glauca Hiu Karet, Carcharhinus falciformis (Hiu Sutra) , Carcharhinus albimarginatus (Hiu Sonteng), Rhina ancylostoma Bowmouth guitarfish, Carcharhinus melanopterus (Hiu Karang Sirip Hitam), Carcharhinus brevipinna (Hiu Lanjaman, Merak Bulu), Rhynchobatus australiae (Pari Lontar), Carcharhinus leucas (Hiu Kerbau, Hiu Buas, Hiu Bujit) dan Carcharhinus amblyrhynchos (Lanjaman Karang)
2	04 Maret 2026	Thamrin Rachmatan (CV. Utama Laut Mandiri)	-	-	KBLI 03151 - Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Apendiks CITES	Gosoma, RT 008 RW 002, Kelurahan Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara	Carcharhinus limbatus (Hiu Lanjaman), Carcharhinus melanopterus (Hiu Karang Sirip Hitam), Batomorphi (Pari)

3	26 Maret 2026	La Jaohati	I- 20231130064114 6329783	-	KBLI 03151 - Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku	Carcharhinus falciformis (Hiu Lanjaman), Carcharhinus brevipinna (Hiu lanjaman lancip), Carcharhinus amblyrhynchos (Hiu Kelabu Karang)
4	27 Maret 2026	Arahman Amir	100/I/KKP/2021	00172/SAJI/DN/UP T DJPK3/II/2026	KBLI 03151 - Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	Desa Waihatu, Kec. Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku	Carcharhinus brevipinna (Hiu lanjaman lancip), Carcharhinus falcimormis (Hiu Lanjaman/Uyang), Sphyrna Lewini (Hiu Martil), Carcharhinus leucas (Hiu Kerbau)

• **Sasaran Kegiatan 5 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 yaitu “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif” diuraikan dalam 3 IKU yaitu (1) “*Indeks operasi kapal pengawas*”; (2) “*Indeks operasi speedboat pengawas*” (3) “*Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada pengawasan SDKP*”. Adapun capaian Indikator Kinerja pada Sasaran kegiatan 5 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Capaian Sasaran Kegiatan 5 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
		2026	MARET	MARET		s/d MARET	s/d MARET	
SK.05	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif			110			110	
IK.06	Indeks Operasi Kapal Pengawas	92,25	89	97,9	110	89	97,9	110
IK.07	Indeks Operasi Speedboat Pengawas	92,25	0			0	0	
IK.08	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan perawatan Sarana / Armada pengawasan SDKP	100	0			0	0	

3. IKU . 06 “Indeks operasi kapal pengawas

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal

pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; dan
- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Pencapaian IKU ini berdasarkan hasil perhitungan kinerja kapal pengawas HIU 13 dengan variabel pembentuk :

1. Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%) : Nilai 40
2. Cakupan Wilayah Pengawasan (40%): Nilai 40
3. Tindak Lanjut Target Operasi (15%): Nilai 15
4. Hasil Dukungan Operasi Lainnya (5%) : Nilai 5

Adapun hasil perhitungan nilai Indeks kinerja kapal pengawas pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Perhitungan Indeks Operasi Kapal Pengawas

No	Satker	Kapal Pengawas	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)	Hasil dan Tindak Lanjut Operasi (3%)	Dukungan Operasi Lainnya (2%)	Total Nilai Indeks per Kapal	Nilai per Satker
			TW I	TW I	TW I	TW I	TW I	TW I
			Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
14	Stasiun PSDKP Ambon	KP. HIU 13	50,00	45,00	1,50	1,4	97,90	97,90

Berdasarkan hasil kegiatan gelar operasi yang telah dilaksanakan oleh Awak Kapal Pengawas HIU 13 dengan total hari operasi 10 HO telah dilakukan pemeriksaan terhadap 33 KII dan 2 Objek Pengawasan Ruang Laut dan WP3K.

Nilai Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 tercapai secara maksimal dengan target 89 dan capaian 97,8. Keberhasilan pencapaian target operasi kapal pengawas tidak terlepas dari peran Timja Sarana dan Prasarana, Nakhoda serta Awak Kapal Pengawas HIU 13, seluruh pengawas perikanan dan pengawas kelautan dan juga keterlibatan Instansi terkait dalam pelaksanaan gelar operasi.

Tabel 3.7 Capaian IK 06 "Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas"

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		Triwulan I TAHUN 2025	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK. 06	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	85	92,91	0	0	85	92,91	92	96,8	89	97,8

Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian Indikator Kinerja Utama 06 “ Indeks operasi kapal pengawas” telah terealisasi sebesar 97,8 dari target 89 atau 110% (Tabel 3.4) . Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Indeks Triwulan I Tahun 2026 lebih tinggi dari Tahun 2022-2025. Hal ini menjadi tolak ukur agar Indikator kinerja Operasi Kapal Pengawas akan lebih ditingkatkan di Tahun selanjutnya dengan melakukan antisipasi apabila terjadi cuaca buruk pada saat Hari Operasi yang mengakibatkan rendahnya jumlah Kapal Perikanan yang diperiksa. Sasaran ini dirancang selama proses pelaksanaan rencana strategis 2025 – 2029. Namun, seluruh indikator pada sasaran ini telah mengalami perubahan yang signifikan dengan indikator yang tercantum dalam rencana jangka menengah. Oleh karena itu, jika dibandingkan indikator tersebut lebih tinggi dari target jangka menengah.

Indeks Kinerja ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.4.965.878.000 (Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). Hingga akhir Triwulan I Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp 4.602.309.701 (Empat Miliar Enam Ratus Enam Ratus Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah), yang setara dengan 92,68 % dari total alokasi anggaran. Berdasarkan hasil capaian yang diperoleh dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dapat mendukung kegiatan secara efisien yang didukung oleh Kegiatan Operasi Kapal Pengawas, Awak Kapal Pengawas, dan SDM lainnya yang mumpuni.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran/indikator ini dicapai dengan memanfaatkan informasi yang telah disusun dalam peta kerawanan pelanggaran. informasi dari peta kerawanan tersebut digunakan untuk memfokuskan operasi pengawasan pada titik-titik rawan pelanggaran, sehingga memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan operasi armada Pengawasan SDKP. Selain itu, efisiensi juga diupayakan dengan memastikan setiap komponen penyusun dalam kegiatan operasi pengawasan selalu tercapai secara optimal.

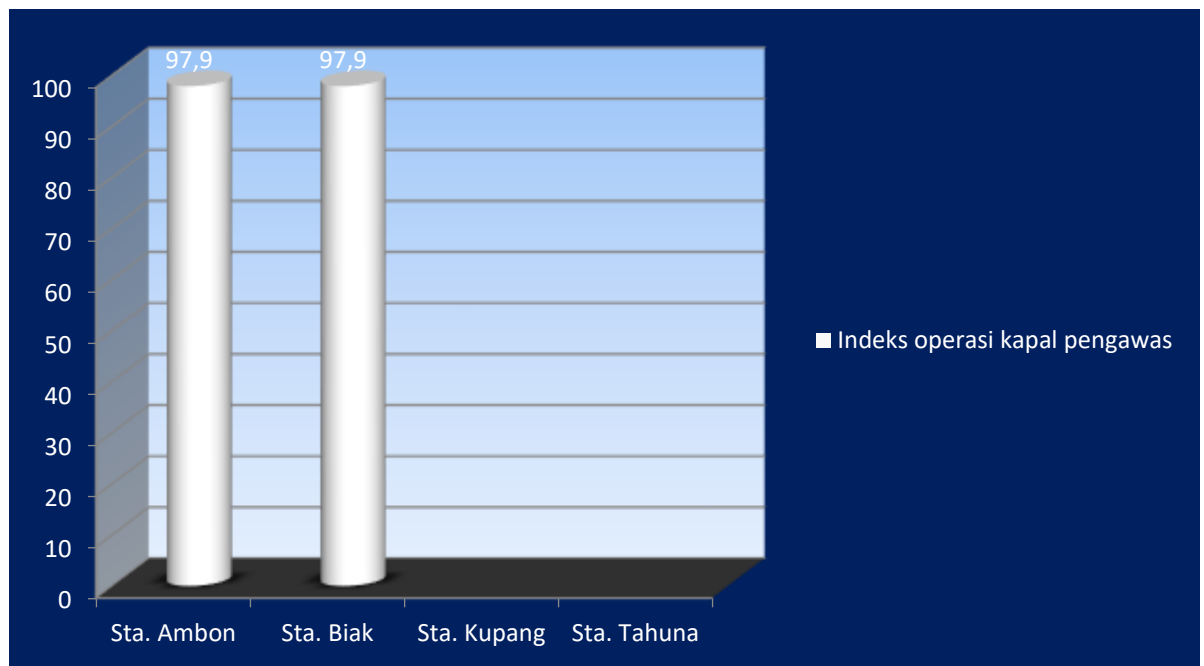
Untuk meningkatkan keterampilan Awak Kapal Pengawas, pada Triwulan I Tahun 2026 13 orang Awak Kapal Pengawas telah mengikuti pelatihan Diklat Nasional Optimalisasi Kemampuan Digital Pendidik dalam Kurikulum Nasional, 3 orang Awak Kapal Pengawas telah mengikuti pelatihan Bimbingan Teknis Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan, 5 orang Awak Kapal Pengawas telah mengikuti Sosialisasi PSDKP SMART Chapter II yang berjudul Lesson Learn “Japan’s Perspective on Countermeasure Against IUU Fishing”, 1 orang Awak Kapal Pengawas telah mengikuti Pelatihan Dasar - Dasar Penanganan Mamalia Laut Terdampar, dan 1 orang Awak Kapal Pengawas telah mengikuti Pelatihan Microlearning Pengantar Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut.



Gambar 5. Kegiatan Gelar Operasi Kapal Pengawas Stasiun PSDKP Ambon Triwulan I Tahun 2026

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa UPT PSDKP dapat mencapai nilai lebih dari target yang ditetapkan. UPT Stasiun PSDKP Ambon dan UPT Stasiun PSDKP

Biak mencapai nilai lebih dari 95 (Gambar 3.4) sedangkan untuk UPT Stasiun PSDKP Kupang dan Tahuna belum melaksanakan operasi di Triwulan I.



Gambar 6. Capaian kinerja “Indeks kinerja operasi kapal pengawas” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2026

- **Sasaran Kegiatan 6 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 yaitu “*Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan*” diuraikan dalam 2 IKU yaitu (1) Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan dan (2) “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Sasaran kegiatan ini memiliki alokasi anggaran setelah efisiensi sebesar Rp.267.749.000 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Hingga akhir Triwulan I Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp 7.021.201 (Tujuh Juta Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Satu Rupiah) yang setara dengan 2,60 % dari total alokasi anggaran. Berdasarkan hasil capaian yang diperoleh dapat dilihat bahwa realisasi anggaran masih rendah namun dapat mendukung kegiatan secara efisien yang didukung oleh SDM yang mumpuni meskipun di tengah adanya efisiensi anggaran.

Tabel 3.11. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan 6 “Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
		2026	MARET	MARET		s/d MARET	s/d MARET	
SK.06	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan			120			120	
IK.09	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	82	65	100	120	65	100	120
IK.10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	82	65	100	120	65	100	120

4. IKU 09. “Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan”

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:

- UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Tabel 3.14. Capaian kinerja IKU 09 “Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TRIWULAN I TAHUN 2026	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.09	Indeks Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80	100	80	100	80	80	65	65	65	100

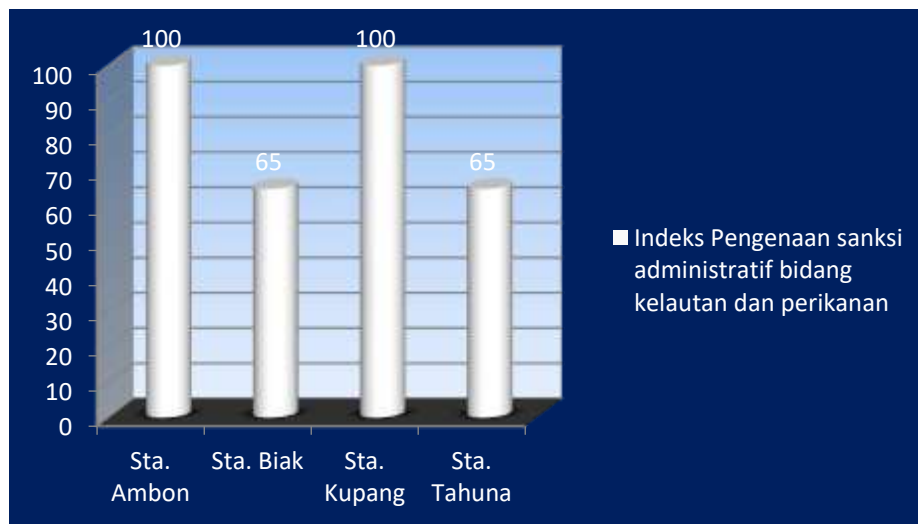
Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian IKU 09 “Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan” tercapai dengan nilai sebesar 100. Pada Tahun 2025 nilai capaian sebesar 65, sedangkan pada Triwulan I Tahun 2026 nilai capaian sebesar 100 dengan upaya pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan terhadap 1 Kapal Perikanan yang terpantau.

Tabel 3.15. Perhitungan Indeks kinerja pengenaaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan”

IKU INDEKS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	UPT	PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KP (BOBOT 0,5)			TAHAPAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KP (BOBOT 0,5)			TOTAL NILAI AKHIR IKU
		SPKP	NON SPKP	SUB TOTAL	SPKP	NON SPKP	SUB TOTAL	
13	Ambon	100.00		50.00	100.00		50.00	100.00

IKU “Persentase Pengenaan Sanksi Administratif bidang kelautan dan perikanan” juga merupakan IKU yang ditargetkan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Seluruh pencapaian kegiatan yang dilakukan terhadap IKU ini tidak terlepas dari peran serta Pengawas Kelautan, dan Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon dalam melakukan kegiatan pengawasan dengan tujuan menertibkan peraturan perundang-undangan bagi para pelaku usaha yang bergerak dibidang kelautan dan perikanan dalam hal ini memberikan dampak langsung terhadap sumber daya perikanan. Berdasarkan hasil capaian dapat dilihat bahwa nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon sama dengan capaian UPT PSDKP Stasiun PSDKP Kupang dengan nilai capaian 100 dan UPT Stasiun PSDKP Biak sama dengan Stasiun PSDKP Tahuna sebesar 65 (Gambar 9).



Gambar 9. Capaian kinerja “kinerja pengenaaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2026

5. IKU 10 “Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan”

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b). Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Tabel 3.12. Capaian kinerja IKU 10 “Persentase pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TRIWULAN I TAHUN 2026	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	0	0	80	100	80	80	65	81	65	100

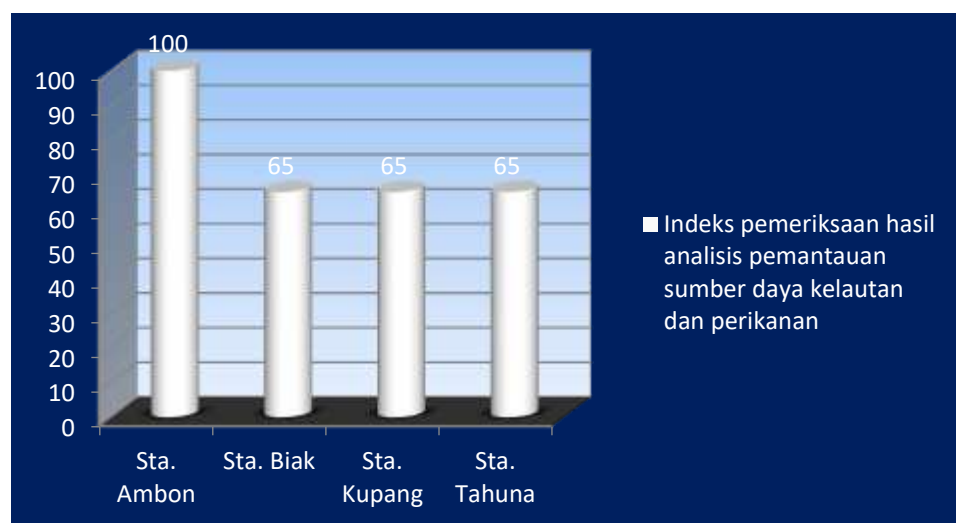
Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian IKU “presentase pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan” tercapai 100 atau sebesar 120%. sehingga dapat dikatakan bahwa Stasiun PSDKP Ambon dapat meningkatkan kinerja capaian. Triwulan I Tahun 2026 jumlah pelanggaran pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan adalah sebanyak 1 Kapal yang terpantau pada Sistem Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SPKP).

Tabel 3.13. Perhitungan Indeks kinerja pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan”

IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan																			
Update 31 Maret 2026																			
NO	UPT	HASIL ANALISIS PUSDAI (INDIKASI PELANGGARAN)								ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT							Nilai capaian
		TRANSHIPMEN T	PELABUHAN PANGKALAN	DPR	JALUR (<12 NM)	ZONA KONVERSI	POACHING	SUPERFISH	JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	SURAT PEMBANGGILAN	BUKTI PEMBANGGILAN	BAP	SP1	SP2	DEKUDA		
(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.1	Ambon	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00

IKU “pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan” ini juga merupakan IKU yang ditargetkan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Berdasarkan hasil capaian dapat dilihat bahwa nilai capaian Stasiun PSDKP

Ambon lebih besar dari hasil capaian UPT Stasiun PSDKP Biak, Stasiun PSDKP Kupang dan Stasiun PSDKP Tahuna dengan nilai capaian sebesar 100 (Gambar 8.)



Gambar 8. Capaian kinerja “Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan” Triwulan I Tahun 2026

6. Sasaran Kegiatan 8 “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan”.

Pencapaian sasaran kegiatan 8 yaitu “Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan” pada Triwulan I Tahun 2026 tercapai 3 Indikator Kinerja (IK). Adapun penjabaran IK sebagai berikut:

Tabel 3.16 Capaian Sasaran Kegiatan 8 “Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
		2026	MARET	MARET		s/d MARET	s/d MARET	
SK.08	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			102,32			102,32	
IK.16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100	100	100	100	100
IK.17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	86	86	86	100	86	86	100
IK.18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Stasiun PSDKP Ambon	88,8	88,8	94,29	106	88,8	94,29	106

7. IKU 16“Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Capaian IK “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)” pada Triwulan I Tahun 2026 yakni 100 atau 100% dari target yang ditetapkan yakni 100.

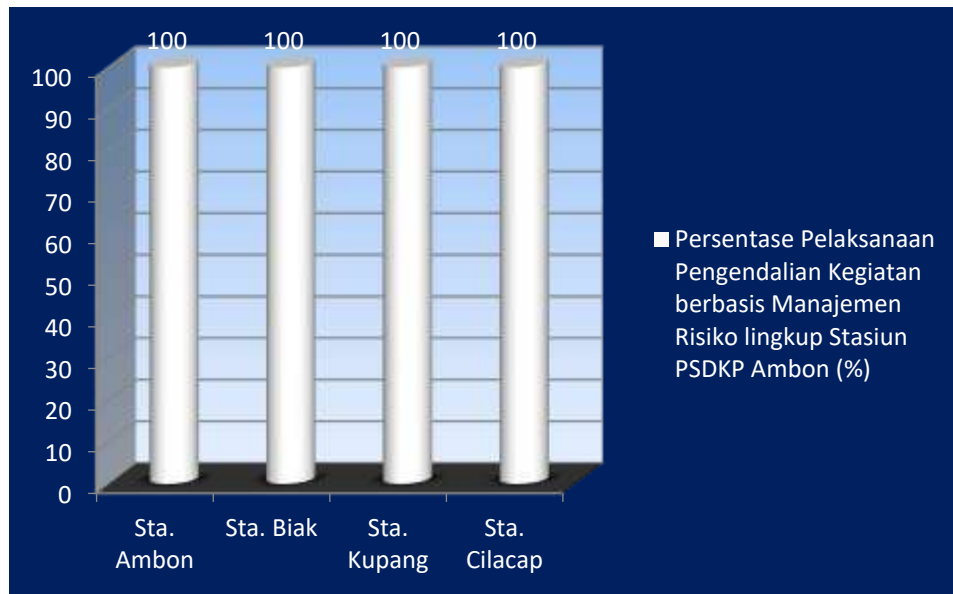
Tabel 3.17 Capaian IKU 16“Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		Triwulan I Tahun 2026	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.16	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	84	97,08	86	121,67	94	122,5	100	100	100	100

Capaian IK ini dilakukan dalam bentuk pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

IK ini merupakan indikator kinerja yang dilakukan perhitungan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan (Gambar 18)



Gambar 10. Capaian Kinerja “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%) Eselon IV Ditjen PSDKP” I Tahun 2026

8. Capaian IKU. 17 “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan”

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan merupakan Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP, tidak ada sisa rekomendasi temuan Stasiun PSDKP Ambon, sehingga berdasarkan dokumen informasi indikator kinerja, capaian yang didapat setara dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel. 3.18 Capaian IK 17“ Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TRIWULAN I TAHUN 2026	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	70	100	75	100	80	100	95	95	86	86

Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian IK 17 “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan” sebesar 86 atau 100% dari target yang ditetapkan yakni 86.



Gambar 11. Capaian Kinerja “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2026

IK ini merupakan indikator kinerja yang ditetapkan terhadap seluruh UPT Direktorat Jenderal PSDKP, berdasarkan perbandingan dengan beberapa UPT lainnya, dapat dilihat bahwa, capaian IKM Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan memiliki nilai yang setara dengan UPT Lainnya lingkup DITJEN PSDKP (Gambar 3.19).

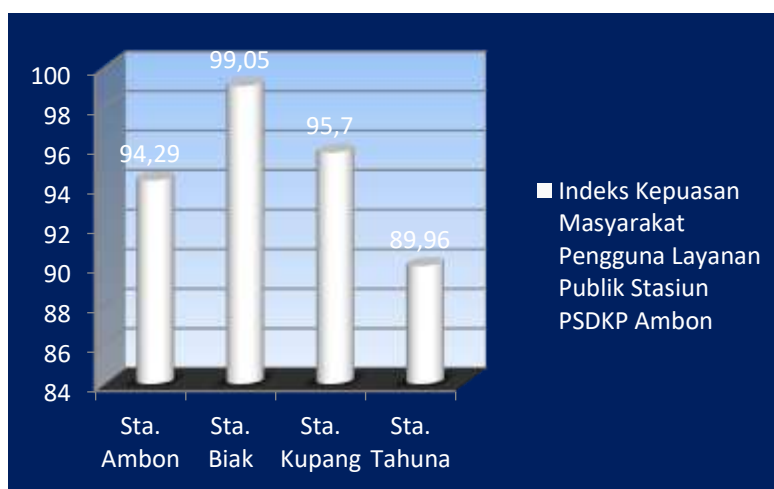
9. Capaian IK 18 “Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Stasiun PSDKP Ambon”

Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Stasiun PSDKP Ambon adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Ambon. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Ambon, yaitu Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) dengan nilai capaian 94,29.

Tabel. 3.19 Capaian IK 18 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TRIWULAN I TAHUN 2026	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
IK.18	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon	0	0	80	90,88	80	96,3	88,5	94,82	88,8	94,29

Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian IK “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon “ sebesar 94,29 atau lebih dari target yang ditetapkan 88,8. Seluruh pencapaian kegiatan yang dilakukan pada IKU ini tidak terlepas dari peran serta Pengawas Perikanan maupun petugas pelayanan publik Stasiun PSDKP Ambon dalam mengedepankan budaya pelayanan prima. IK ini merupakan indikator kinerja yang ditetapkan terhadap seluruh UPT Direktorat Jenderal PSDKP, berdasarkan perbandingan dengan beberapa UPT lainnya, dapat dilihat bahwa, capaian IK Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna Layanan Publik lingkup DITJEN PSDKP mampu mencapai nilai capaian lebih dari 80 (Gambar 26).



Gambar 12. Capaian Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon” I Tahun 2026

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sebesar Rp. 7.944.739.075,- (*Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah*) atau 38,95% dari total yang dianggarkan Rp. 20.396.318.000,- (*Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*). Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon pada Triwulan I Tahun 2026

NO	Kode	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2350	8.668.976.000,-	4.818.324.310,-	55,58
2	2351	269.749.000,-	7.021.201,-	2,60
3	2352	719.178.000,-	150.255.692,-	20,89
4	2353	82.246.000,-	0,-	0
5	2355	10.656.169.000,-	2.969.137.872,-	27,86
Total		20.396.318.000,-	7.944.739.075,-	38,95%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran PSDKP Ambon yang tertuang dalam perjanjian kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Ambon pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 114,46 %, dengan kategori Istimewa;
2. Seluruh Indikator Kinerja Utama Stasiun PSDKP Ambon Triwulan I Tahun 2026 telah tercapai sesuai dengan target capaian.

B. Saran

Berdasarkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon Triwulan I Tahun 2026 telah tercapai dengan kategori Baik, namun ada beberapa hal terkait nilai capaian yang perlu ditingkatkan pada Tahun Depan yakni :

1. Meningkatkan capaian Kinerja Indeks Operasi Speedboat Pengawas mengingat belum terdapat capaian pada Triwulan I dikarenakan semua Speedboat dalam keadaan docking sehingga tidak dapat melakukan gelar operasi speedboat pengawas;
2. Meningkatkan capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Stasiun PSDKP Ambon;

C. Rekomendasi

1. Melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan docking Speedboat Pengawas dan persiapan gelar operasi speedboat pengawas di Triwulan II;
2. Melakukan monitoring terhadap pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik (penerbitan SLO) Stasiun PSDKP Ambon;

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2026



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditiensdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Johanis Johniforus Medea

Jabatan : Kepala Stasiun PSDKP Ambon

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan SDKP
Ambon

Johanis Johniforus Medea

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	8.668.976.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	269.749.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	719.178.000
	d. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	82.246.000
2.	Program Dukungan Manajemen	10.656.169.000
Total Anggaran Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2026		20.396.318.000

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan SDKP
Ambon



Johanis Johniforus Medea

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	83
2.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan (Nilai)	100
		3. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan (Nilai)	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan (Nilai)	83
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5. Nilai Kualitas Pengawasan sumber daya perikanan (Nilai)	83
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6. Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)	92,25
		7. Indeks operasi speedboat pengawas (Indeks)	92,25
		8. Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP (Indeks)	100
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	82
		10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	82
7.	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	82
8.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	81,75
		13. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	81,5
		14. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	92,1

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		15. Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	88,2
		16. Presentase Pelaksanaan Pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Ambon (%)	100
		17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	86
		18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	88,8
		19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	75
		20. Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	78
		21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	71